

PRAGMATISME KADERISASI INTERNAL DPP PARTAI GOLKAR ERA REFORMASI (STUDI KASUS DI DPP PARTAI GOLKAR)

Ghiffary Asy Syauckani, Dr. Sos. Dra Fitriyah, M.A.

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang. Kode Pos. 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is to find out why pragmatism occurs in internal regeneration in the Golkar Party DPP which is the object of this research in carrying out the party's cadre. The method used in this research is descriptive qualitative method, which is trying to describe and interpret what happened. Based on the results found in the field research, it is explained that the pragmatism that occurs in the internal regeneration of the Golkar Party DPP is caused by many related factors, since the Election system in Indonesia uses the Open Proportional System, the Golkar Party tends to be pragmatic, ie, views its cadres and prospective cadres from how likely they are to be able to bring the Golkar Party won votes and influence from the community. In this case those who are considered pragmatically are classified as ADP (Activists, Blue Blood, and Entrepreneurs) These 3 groups are considered to be more beneficial to the Golkar Party than other cadres.

Keywords: Political Parties, Recruitment, Cadreization

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui mengapa terjadi pragmatisme dalam kaderisasi internal di DPP Partai Golkar yang menjadi objek penelitian ini dalam melaksanakan perkaderan partainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Berdasarkan hasil yang ditemukan dari penelitian di lapangan menjelaskan bahwa pragmatisme yang terjadi di kaderisasi internal DPP Partai Golkar disebabkan oleh banyak faktor yang berkaitan, semenjak sistem Pemilu di Indonesia menggunakan Sistem Proporsional Terbuka, Partai Golkar cenderung pragmatis, yaitu memandang kader-kadernya maupun calon kadernya dari seberapa besar kemungkinan mereka untuk bisa membawa Partai Golkar meraih suara dan pengaruh dari masyarakat. Dalam hal ini mereka yang dipandang secara pragmatis digolongkan sebagai ADP (Aktivis, Darah biru, dan Pengusaha) 3 golongan ini dianggap lebih menguntungkan Partai Golkar dibanding kader lainnya.

Kata Kunci : Partai Politik, Rekrutmen, Kaderisasi, Pragmatisme

Pendahuluan

Kaderisasi mempertahankan eksistensi dan keberadaan organisasi, termasuk DPP Partai Golkar mempunyai sistem kaderisasinya tersendiri untuk mempertahankan keberadaan partai, meregenerasi kadernya agar tetap bertahan seiring waktu, tetapi kaderisasi internal yang dijalankan DPP Partai Golkar tidak dijalankan dengan baik, karena terjadi pragmatisme yang membuat partai hanya memandang kader yang dinilai menguntungkan partai untuk menjadi bagian berpengaruh di Partai Golkar.

Ketika kaderisasi kepemimpinan partai politik tidak berjalan dan gagal, maka akan menyebabkan visi, misi dan tujuan organisasi tidak sampai kepada generasi penerusnya, tidak mungkin bagi generasi yang sebelumnya memikul sendirian karena pada suatu titik harus ada pergantian kepengurusan, partai akan kesulitan dalam melakukan pergantian pengurus dikarenakan tidak tersedia orang yang mampu melanjutkan kepengurusan karena tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan. Para anggota yang tidak dikader merasa tidak diperdulikan oleh partai kemungkinan akan meninggalkan partai tersebut, sehingga bisa menyebabkan partai tersebut kekurangan kader yang mana akan membuat program-program yang dirancang menjadi tidak berjalan, eksistensi dari partai tersebut kian lama akan lenyap dan pada akhirnya ketika sudah tidak ada yang tersisa di partai tersebut, besar kemungkinan akan bubar.

Dewasa ini, nilai-nilai yang dianut oleh Partai Golkar seakan mulai lenyap. Nilai Karya-Kekarya yang dibawa oleh Partai Golkar sebagai suatu doktrin utama kader Partai Golkar yang menegaskan bahwa ideologi dan aliran politik harus dihapuskan atas dasar mengutamakan karya nyata untuk negara sudah tidak terlalu terasa di partai ini terkhususnya DPP Partai Golkar. Nilai ini luntur karena kondisi Partai Golkar ini cenderung menjadi pragmatis.

Pragmatisme yang menjangkiti Partai Golkar ini cukup memberi dampak bagi partai, pragmatisme yang dimaksud disini adalah menilai suatu hal dari unsur materialistik yang dianggap menguntungkan, sehingga pragmatisme menyebabkan ketidakadilan yang menguntungkan beberapa pihak kader Partai Golkar dan merugikan sebagian pihak lain dari kader Partai Golkar.

Pragmatisme membuat partai tidak melihat para kadernya secara objektif, sehingga kader yang tidak dipandang secara objektif akan merasa kecewa didalam organisasi yang dia ikuti

dan pada akhirnya membuat kader tidak memberikan performa yang maksimal dalam menjalankan tugas partai.

Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk melihat performa partai adalah seberapa besar partai tersebut mampu meraup suara masyarakat, karena kader-kader yang mempunyai kapabilitas akan mampu mendongkrak kemampuan partai dalam meraih kepercayaan masyarakat untuk mendukung suatu partai menjadi yang berkuasa dalam menjalankan suatu kebijakan,

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lincoln dan Guba (1985:52) mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan.

Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaderisasi, rekrutmen, dan partai politik.

A. Kaderisasi

Kader menurut KBBI adalah perwira atau bintanga dalam ketentaraan: orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai dan sebagainya. Sedangkan pengkaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik, atau membentuk seseorang menjadi kader (Daryanto, 1998: 289).

Menurut Triwidaryanta (2008:13), kaderisasi adalah proses mencari bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Kaderisasi bisa dibidang sebagai suatu ajang pendidikan kader untuk mengetahui dan mengembangkan potensi individu para kader dengan cara menanamkan ide serta mentransfer pengetahuan, agar dapat memunculkan kader-kader yang siap dan tangguh dalam menghadapi dinamika politik, juga

memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi.

B. Rekrutmen

Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik, menurut Ramlan Surbakti (1992:189) fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan yaitu dengan adanya regenerasi terus menerus kepengurusan partai politik tersebut sehingga harus selalu dilakukan rekrutmen dalam mencari orang-orang untuk regenerasi yang juga memiliki kapabilitas dalam menjalankan partai politik serta membawa lebih partai politik ke arah yang lebih baik lagi.

Ramlan Surbakti (1992:188) juga mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen Politik merupakan suatu keutamaan yang harus dijalankan oleh partai politik demi meneruskan kepemimpinan dan kepengurusan partai dalam mempertahankan kinerja partai agar tetap selalu menghasilkan output yang terbaik. Jika partai politik tersebut adalah partai yang menjadi mayoritas pemenang didalam lembaga legislatif maka partai politik tersebut punya kesempatan untuk berwenang dalam membentuk pemerintahan di sistem politik demokrasi karena memiliki suara yang besar dalam menentukan keputusan, rekrutmen politik tersebut sangat penting dilakukan oleh parpol, karena fungsi rekrutmen itu sendiri juga suatu kelanjutan dari fungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan partai politik tersebut di lembaga perwakilan rakyat.

C. Partai Politik

menurut Miriam Budiarjo (2008:404), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik punya tujuan untuk menduduki posisi politik dan juga meraih kekuasaan melalui suara rakyat secara sah menurut konstitusi untuk melaksanakan kebijakan dan keinginan serta cita-cita dari partai politik. Jika dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, partai politik memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama yang dimana seluruh anggotanya memiliki pemahaman yang sama terkait hal tersebut, dalam hal ini, partai politik harus melakukan persamaan persepsi

bagi para anggotanya yang sudah maupun mereka yang sedang dalam masa transisi untuk menjadi bagian dari partai politik tersebut.

Sigmund Neuman dalam Miriam Budiardjo (2008: 403) mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang pandangannya dianggap berbeda. Persaingan yang terjadi antar partai politik menjadi hal yang lumrah. Adu kemampuan tiap partai politik menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda tergantung dengan strategi yang tiap partai sudah siapkan dalam menarik minat masyarakat harus dimiliki oleh seluruh kader partai yang tergabung. Pentingnya kesamaan persepsi dalam meraih perhatian masyarakat sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat menilai mana partai politik yang “rapih”, akan menarik hati masyarakat sehingga nantinya akan besar kemungkinan dipilih oleh rakyat.

Pembahasan

Kaderisasi Partai Golkar

Partai Golkar sendiri memiliki program kaderisasi untuk para kadernya sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang dimana menjadi salah satu fungsi dari keberadaan partai politik, secara umum, pengkaderan di Partai Golkar terbagi menjadi 3 bagian:

1. Pengkaderan Umum

Pengkaderan umum merupakan pengkaderan politik yang bersifat struktural maupun fungsional. Pengkaderan yang bersifat struktural adalah pengkaderan yang dilakukan ditingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Lemabga Pengelola Kaderisasi (LPK) Partai Golkar sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan pengkaderan yang bersifat fungsional adalah perkaderan yang diikuti oleh kelompok-kelompok fungsional berdasarkan pengelompokan strategis (pemuda, perempuan, pengusaha, tokoh agama, tani, nelayan, cendekiawan, pendidik, pers, pekerja, seniman/budayawan), yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekelompok strategis yang bersangkutan bekerja sama dengan LPK sesuai dengan tingkatannya. Pengkaderan ini ditujukan untuk kader madya, yaitu kader penggalang dan kader fungsional.

2. Pengkaderan Khusus

Pengkaderan khusus adalah pengkaderan yang diselenggarakan oleh Partai Golkar yang ditujukan kepada kader-kader yang akan dan atau sedang menduduki posisi-posisi tertentu (jabatan politik pada legislatif, eksekutif, maupun jabatan-jabatan fungsional kemasyarakatan lainnya) dalam rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan partai, yang dilaksanakan oleh LPK sesuai dengan tingkatannya. Peserta pengkaderan khusus di semua tingkatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti pengkaderan umum.
2. Diusulkan oleh pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya.

Pengkaderan ini ditujukan untuk kader calon politisi, yaitu kader pemerintahan dan kader penggerak partai. Dasar pemikiran diadakannya pelatihan kader ini adalah untuk menghadapi Pemilihan Legislatif, di mana Partai Golkar membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kompetisi politik mendatang.

3. Pengkaderan Teritorial Kelurahan

Pengkaderan territorial Kelurahan merupakan pengkaderan yang dilakukan oleh partai di tingkat Kelurahan dalam rangka memperluas basis massa. Untuk pengkaderan territorial Kelurahan pesertanya adalah sebagai berikut:

1. Anggota, simpatisan Partai Golkar yang berdomisili di Kelurahan
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah menikah

Pengkaderan ini ditujukan untuk kader pemula, yaitu: Kader teritorial kelurahan. Dalam Buku Materi Pendidikan dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa Partai Golkar dijelaskan pengkaderan teritorial kelurahan dilaksanakan secara reguler dalam jangka waktu tertentu. Pengkaderan teritorial kelurahan merupakan tahap awal bagi kader-kader untuk menjadi kader profesional Partai Golkar.

Pelaksanaa Kaderisasi di Partai Golkar

Pelaksanaan kaderisasi di Partai Golkar tidak berjalan dengan baik, menurut salah satu narasumber yaitu Ichsan Firdaus, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Periode Kepengurusan tahun 2014-2019, sekarang ia menjabat di periode ke-2 di DPR-RI Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa dalam sekali periode kepengurusan yang terjadi selama 5 tahun, DPP Partai Golkar hanya melaksanakan sekali orientasi fungsionaris pada setahun kepengurusan bagi para kader partai. Berkut pernyataannya, “Yang saya tahu hanya saat melakukan pelatihan fungsionaris sekali pada setahun

kepengurusan dan juga pemilu berdasarkan kebutuhan caleg” (wawancara tanggal 6 Februari 2020)

Ichsan Firdaus juga menyatakan bahwa Partai Golkar tidak menetapkan aturan yang detail dan rigid mengenai pelaksanaan perkaderan di Partai Golkar, tidak ada penetapan minimum pelaksanaan ataupun ketentuan yang membuat kaderisasi harus dengan *saklek* dilaksanakan pada periode tertentu. Aturan mengenai persyaratan menjadi pengurus di Partai Golkar pun seringkali dilanggar, seperti yang diucapnya:

Nggak ada, itu ga ada persyaratan, yang ada persyaratannya itu tertulis di AD/ART hanya syarat menjadi pengurus, itu harus 5 tahun jadi anggota partai, ini yang sering kali dilanggar, tapi Golkar sudah menetapkan, itu tetapi sering dilanggar” (wawancara tanggal 6 Februari 2020)

Semenjak reformasi pun Partai Golkar belum melaksanakan program perkaderannya dengan sungguh-sungguh. Menurut Darul Siska, kader Partai Golkar sejak sebelum reformasi dan menjadi Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian tahun 2014-2019, bahwa:

Saya yang ikut di Partai Golkar semenjak Orde Baru sampai sekarang, jadi semenjak reformasi, Golkar itu belum melaksanakan program perkaderan sungguh-sungguh, umpamanya periode awal reformasi kepemimpinan pak Akbar, itukan perkaderan kita tidak dilaksanakan secara sistematis sebagaimana mustinya program yang kita punya, nah cuma diuntungkan periode 1997&1999 itu Golkar bisa bertahan di urutan kedua sebagai pemenang karena masih ada kader lama yang militan, sehingga masih tetap pada kedua (wawancara tanggal 11 Februari 2020)

Hambatan Kaderisasi Partai Golkar

1. Pragmatisme

Pemenangan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serta meraih suara masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi suatu partai politik untuk mempertahankan eksistensi partai, hal itu juga membutuhkan dua sumber utama yaitu kebutuhan sumber daya manusia yang bisa diperoleh dengan kelembagaan dan kaderisasi, serta sumber daya finansial. Tetapi seperti yang kita ingat bahwa Partai Golkar sebelum reformasi sudah terbiasa “termanjakan” dengan kehadiran Soeharto yang mampu menyediakan kebutuhan finansial yang disediakan lewat yayasan yang

sebelumnya disebutkan, ketika Soeharto runtuh dan yayasan tersebut tidak bisa membantu, maka Partai Golkar juga secara logika berpikir untuk menunjang survivalitasnya membutuhkan sumber daya finansial agar bertahan, maka Partai Golkar pun menarik banyak pengusaha untuk menjadi kader Partai Golkar dengan harapan mereka mampu untuk membantu dan menopang Partai Golkar.

2. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem Proporsional terbuka yang pertama kali dilaksanakan pada pemilu legislatif tahun 2009 mengubah cara pandang Partai Golkar dalam menarik kader-kader Partai Golkar untuk kebutuhan kemenangan pemilu, ketika sebelumnya pemilihan umum menganut Sistem Proporsional Tertutup, dimana partai sendiri menentukan kader-kader terbaiknya yang akan ditempatkan di posisi nomor urut yang kecil berdasarkan kualitas dan kualifikasi kader partai. Dengan Sistem Proporsional Tertutup, transparansi mengenai pengalaman dan keaktifan dari kader-kader Partai Golkar yang memiliki prestasi dan kontribusi besar bagi Partai Golkar otomatis membuat mereka akan ditempatkan di posisi yang bagus dalam pemilihan umum karena partai lah yang memiliki kuasa untuk menempatkan posisi mereka, dan pastinya penempatan mereka melalui penilaian objektif dari kualifikasi diri kader, sehingga kader partai akan berlomba-lomba menjadi kader yang terbaik. Hal berbeda, melalui Sistem Proporsional Terbuka menyebabkan siapapun yang memang sanggup memiliki kemampuan menarik suara rakyat bisa mencalonkan diri di dalam pemilu, sehingga tidak lagi ditentukan oleh partai dalam kualifikasi penilaian mereka bagi kontribusi partai, yang penting mereka mempunyai modal atau memiliki basis massa yang sanggup mengangkat suara partai.

3. Penerapan Aturan Perkaderan Yang Tidak Ketat

Proses kaderisasi para kader Partai Golkar tidak diatur dengan ketat dalam pelaksanaan dan implementasinya, tidak adanya peraturan yang berlaku mengenai kewajiban untuk melaksanakan kaderisasi dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi menyebabkan sering terjadi kesewenangan oleh mereka yang ingin memanfaatkan Partai Golkar demi benefit pribadi dalam agenda politik masing-masing, sehingga membuat ketidak teraturan dalam kelembagaan partai. Partai Golkar pun juga terasa tidak terlalu memperhatikan problematika ini yang dimana menyebabkan kader-kader yang sungguh dikader dan kader yang militan menjadi mempertanyakan apakah Partai Golkar telah kehilangan ruh serta

nilai-nilainya demi kepentingan pragmatis semata. Seperti yang dikatakan oleh Ichsan Firdaus;

Pemilu semakin terbuka, kompetisi semakin kuat maka yang diperlukan adalah orang-orang yang dianggap kuat, nah itulah pragmatisnya partai golkar. Tapi apakah melalui proses kaderisasi? Ada sebagian yang tidak melalui proses kaderisasi yang melalui pelatihan yang di desain dan teoritisnya diatur menurut AD/ART, sering kali hanya dalam kurun waktu 6 bulan mereka masuk juga, tetapi tetap seluruh calon anggota dpr ri dprd kab kot tetapi harus melalui tahapan yaitu pelatihan fungsionaris, disitulah yang namanya proses kaderisasi walaupun jangan berfikir proses kaderisasi yang ada digolkar itu secara struktural mulai dari atas sampai bawah itu sudah kehilangan ruhnya partai golkar itu (wawancara tanggal 6 Februari 2020)

Di dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Bab V tentang Struktur dan Kepengurusan pada Pasal 12 Ayat 1 Huruf (a) menyatakan bahwa salah satu syarat pertama menjadi pengurus di Partai Golkar adalah aktif menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Menurut beberapa narasumber yang penulis wawancarai bahwa aturan ini sangat sering dilanggar di DPP Partai Golkar, mereka yang belum genap menjadi anggota selama 5 tahun tiba-tiba bisa menjadi pengurus di Partai Golkar, hal ini sangat membuat sistem kaderisasi tidak sehat dikarenakan bisa membuat orang-orang yang patuh dalam aturan menjadi kecewa dengan ketidaktegasan Partai Golkar dalam menegakkan aturan internal partai.

4. Celah Pada AD/ART dan Peraturan Organisasi

Setelah mencoba melakukan studi pustaka terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, penulis melihat beberapa aturan tertulis yang cukup bisa digunakan sebagai celah penyalahgunaan kader Partai Golkar yang bisa mengganggu mekanisme kaderisasi Partai Golkar. Salah satunya didalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Bab IV tentang “Kader” pada Pasal 5 No. 2 dituliskan “Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan Prestasi yang luar biasa.” Lalu pada No.3 selanjutnya hanya menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Setelah melakukan studi pustaka juga terhadap Peraturan Organisasi Partai Golkar terhadap kelanjutan dari Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Bab IV

tentang “Kader” pada Pasal 5 No. 2 dituliskan “Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan Prestasi yang luar biasa.”, tidak ditemukannya penjelasan lebih lanjut mengenai apapun tentang Prestasi Luar Biasa ini. Tidak adanya ketentuan mengenai indikator-indikator dalam menentukan Prestasi Luar Biasa untuk bisa otomatis menjadi kader Partai Golkar bisa menjadi suatu celah bagi penyalahgunaan status kader Partai Golkar, karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi yang membahas mengenai penetapan kader berdasarkan Prestasi Luar Biasa ini, sehingga dengan absennya indikator tersebut maka Prestasi Luar Biasa bisa ditafsirkan tanpa acuan-acuan yang ditetapkan oleh Partai Golkar, sehingga sangat memungkinkan menjadi suatu pasal karet dalam menjadi suatu alasan untuk memudahkan kader yang tidak melalui ketetapan kaderisasi yang berlaku bisa masuk kedalam Partai Golkar.

Terdapat celah istimewa bagi Purnawirawan TNI/POLRI dan PNS dalam Peraturan Organisasi Partai Golkar mengenai Penataan Administrasi Keanggotaan Partai Golkar pada Bab I Pasal 3 Huruf (e) disebutkan;

Khusus menyangkut anggota Partai Golkar yang berasal dari Purnawirawan TNI/POLRI dan pensiunan PNS yang semasa aktifnya pernah bergabung dalam Keluarga Besar Golkar (Jalur A dan B), dan belum pernah menjadi anggota partai lain, masa keanggotaannya dihitung sejak yang bersangkutan syah menjadi Anggota TNI/POLRI dan PNS (Peraturan Organisasi Partai Golkar, Bab I Pasal 3 Huruf (e))

Dari pasal diatas, dijelaskan bahwa para purnawirawan TNI maupun Purnawirawan Polri yang ketika masih aktif menjadi bagian dari TNI maupun aktif menjadi bagian dari Polri dan juga Pensiunan PNS maupun pejabat tinggi publik yang semasa aktif nya ketika menjadi PNS maupun pejabat publik dan pernah bergabung kedalam Keluarga Besar Golkar Jalur ABRI maupun Jalur Birokrasi, dan dalam kondisi belum pernah mengikuti partai politik lain, maka para Purnawirawan TNI/Polri maupun Pensiunan PNS ini ketika memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari kader Partai Golkar, maka masa keanggotaannya akan dihitung ketika mereka mulai memiliki status sebagai TNI/Polri maupun PNS.

Sebagai contoh jika para TNI/Polri maupun PNS yang sudah menjabat sejak tahun 1980, dan ketika mereka memutuskan ingin menjadi bagian dari kader Partai

Golkar pada tahun 2017, dan dengan kondisi sekarang ketika penulis menulis tulisan ini pada tahun 2020, mereka tidak dihitung menjadi kader Partai Golkar selama 3 tahun, tetapi mereka dianggap telah menjadi kader Partai Golkar selama 40 tahun dimana mereka dihitung dari awal masa mereka memiliki jabatan di TNI, Polri, maupun PNS.

Penutup

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang dibahas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa ancaman utama dari pelaksanaan kaderisasi Partai Golkar itu sendiri adalah dari pragmatisme yang timbul dikarenakan Partai hanya memerhatikan bagaimana agar tetap meraup suara untuk mempertahankan eksistensinya alih-alih juga memperhatikan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik yang salah satunya adalah dengan menjalankan kaderisasi yang baik.

Temuan lain juga menunjukkan terjadi metamorfosa paradigma ABG menjadi ADP (Aktivis, Darah Biru, dan Pengusaha) dikarenakan ketiga golongan tersebut menjadi penyokong Partai Golkar atas dasar Partai Golkar yang berubah menjadi lebih pragmatis untuk kepentingan kemenangan pemilu, sehingga kaderisasi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik karena pengaruh ini.

Limitasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan, masih banyak kekurangan yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian ini masih kurang mendalam dalam mendalami pustaka aturan-aturan partai yang bisa menjadi celah bagi partai untuk menjalankan kepentingan pragmatismenya, serta keterbatasan dalam mengikuti kegiatan perkaderan langsung dikarenakan memang terbatasnya kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Golkar, Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan kajian di dalam topik penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo Miriam 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Bhakti , Ikrar Nusa dan Moch. Nurhasim (eds) 2016, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, KPK Bekerja sama dengan P2Politik LIPI, Jakarta
- Cholisin, dkk. 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta
- Daryanto, M 1998, *Administrasi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Haris, M. Shoim, dkk. 2014. *Melawan Black Hole, Meretas Jalan Baru Politik Beringin*, Jakarta, PP AMPG
- Idrus Marham 2006, *Partai Golkar dan Dinamika Politik Multi Partai*, AMPG Press, Jakarta
- Idrus Marham 2016, *Magnet Politik Partai Golkar : “Gerakan Golkar Bangkit”*, PT. Penjuru Ilmu Sejati, Bekasi
- Ivancevich, J.M 2007, *Human Recourse Management*, McGrawHill, Singapore
- Kartono, Kartini 1994, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba 1985, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications, Beverly Hills
- Mufti , Muslim 2013, *Kekuatan Politik di Indonesia*, 2013, Bandung, Pustaka Setia
- Moertopo, Ali. 1974, *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nurdiani, Nina 2014, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *ComTech*, Vol. 5 , No. 2.
- Pamungkas, Sigit 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta
- Pratiwi, Diah Ayu 2018, *Sistem Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*, Jurnal Trias Politika, Batam
- Putra, Fadillah 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Surbakti, Ramlan 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- Tangkilisan , Hesel Nogi 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta
- Tanjung, Akbar, 2008, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta

Triwidaryanta, Jaka 2008, *Modul Pengkaderan Partai Politik*, Strategic Transformation Institute, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Internet

jurnal-sejarah.com, “jurnal-sejarah”, website:

http://www.jurnal-sejarah.com/id3/2322-2219/Golkar_29135_jurnal-sejarah.html,

diakses tgl. 22/9/2019